

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara China pembangunan desa bukan berbasis komunitas, melainkan sepenuhnya digerakkan oleh negara hal tersebut karena secara politis negara melalui partai komunis menentukan prioritas pembangunan desa. Negara menciptakan koneksi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai pada tingkat desa, dalam hal ini desa yang mempunyai dukungan politik kuat seperti Lanjing maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan. Selain itu pemimpin desa tidak selalu lahir dari pemilihan warga karena ada intervensi politik secara langsung, di mana partai akan menunjuk secara langsung kepala desa ketika dianggap gagal mengatur diri hal tersebut seperti yang terjadi di Qianjiachi (Xin, 2025).

Negara menjadikan desa sebagai sarana dalam mempertahankan legitimasi politik, bukti keberhasilan Xi Jinping dalam *rural revitalization*, serta menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana desa membentuk keterampilan warga dengan adanya pelatihan teknis, kerajinan bambu, pelatihan *e-commerce*, serta transfer pengetahuan dari universitas ataupun lembaga riset kepada masyarakat (Xin, 2025).

Saat terjadi urbanisasi, migrasi, serta menurunnya ekonomi kolektif di China, kepala desa mempunyai peran dalam memobilisasi warga salah satunya

dalam melakukan mediasi terkait kepercayaan politik dengan cara menyampaikan kebijakan pemerintah kepada warga, serta menyerap aspirasi yang datang dari warga untuk disampaikan kepada pemerintah. Kinerja kepala desa sangat menentukan bagaimana membangun kepercayaan politik (*political trust*) dan menentukan sikap warga untuk bisa percaya pada pemerintah dan mau untuk mengikuti program yang dibuat dalam suatu desa. Hal tersebut karena intervensi politik dari pemerintah yang terlalu kuat dapat menyebabkan lemahnya peran kepemimpinan lokal serta mengurangi partisipasi warga (Xu et al., 2025).

Kepala desa rentan terhadap terjadinya tindakan korupsi, seperti yang terjadi di *Blossom Village*, di mana kepala desa merangkap jabatan sebagai kepala desa dan sekretaris partai desa. Hal tersebut berujung pada munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala desa karena kepemimpinan kepala desa dianggap kurang transparan dan tidak serta melakukan transparansi terkait besaran dana transfer lahan (Kan & Sun, 2024). Dengan hal tersebut menjadi catatan besar bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya dan membangun kepercayaan politik yang baik kepada masyarakat, agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Weber (1992), mengatakan bahwa legitimasi kepemimpinan bersumber dari tradisi, kharisma, ataupun legal-rasional. Dalam konteks kepala desa, di Indonesia kepala desa memperoleh legitimasi legal rasional dari adanya mekanisme pemilihan kepala desa yang dipilih secara umum oleh masyarakat. Selain itu legitimasi kepala desa bisa diperkuat oleh faktor tradisional dan

kharismatik (Heldi et al., 2021). Adanya pengakuan dari masyarakat tentunya membuat kepala desa lebih bisa didengar oleh masyarakat baik secara politik ataupun secara tradisi.

Dalam penelitian Mulyeni et al., (2023), Kepala Desa Citata mampu berperan aktif dalam program pembangunan SDM serta membangun kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan kerja sama dengan komunitas lokal. Dengan hal tersebut keberadaan kepala desa sebagai seorang pemimpin sangatlah penting terlebih untuk menjalankan setiap program kerja dari suatu desa yang dipimpinnya (Nursetiawan et al., 2022).

Sejalan dengan itu berdasarkan penelitian Bali et al., (2019), keberhasilan pembangunan SDM Desa Junrejo dilatarbelakangi karena Kepala Desa Junrejo selalu bekerja sama dan gotong royong dengan masyarakat dalam pembangunan desa, salah satunya adalah pembangunan SDM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rumbekwan et al., 2021). Dalam penelitian Pradana & Sitorus, (2020), juga dijelaskan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai $R^2 = 44,3 \%$, yang mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembangunan desa menyangkut paut terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Dalam konteks Desa Sadasari, upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sadasari atas persetujuan Kepala Desa Sadasari. Berdasarkan data kependudukan, desa ini mempunyai luas wilayah sekitar 117,258 hektar. Mayoritas penduduk Desa Sadasari

berprofesi sebagai petani ataupun buruh tani. Berdasarkan data, secara tipologi Desa Sadasari termasuk desa perladangan dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Waktu dalam penelitian ini berkisar pada masa periode Kepala Desa Sadasari dimulai saat dilantik pada tahun 2022 dan sampai sekarang tahun 2025.

Berdasarkan data pemerintahan Desa Sadasari, program pembangunan sumber daya manusia di Desa Sadasari meliputi beberapa hal seperti pelatihan dan pemodalan kelompok tani pria dan wanita, posyandu (pos pelayanan terpadu), pengecekan kesehatan gratis, edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pemberian vitamin, serta gerakan bersih-bersih yang dilaksanakan di Desa Sadasari.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Tahun Terakhir

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka dalam 5 Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
69,20	69,42	70,18	70,76	71,37

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka mencapai nilai 71,37 di tahun 2024 (BPS, 2024). Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi dalam klasifikasi BPS, terlebih di wilayah Ciayumajakuning Kabupaten Majalengka merupakan yang paling tinggi nilai IPM-nya dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Ciayumajakuning. Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka dapat menggambarkan kualitas SDM di wilayah pedesaan meskipun pemerataan pembangunan manusia setiap desanya masih belum merata.

Indikator penilaian indeks pembangunan manusia yang dilakukan Badan

Pusat Statistik (BPS) meliputi tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, serta dimensi standar kelayakan hidup. Hal tersebut sejalan dengan dimensi pembangunan manusia yang dijelaskan oleh Mahbub ul Haq pada tahun 1995 dalam bukunya yang berjudul *Reflection on Human Development* pada tahun 1995. Di mana pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah proses perluasan kebebasan dan kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dengan melihat tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, serta dimensi standar kelayakan hidup (Haq, 1995).

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembangunan desa bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan diperlukan juga pembangunan manusia/sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat SDM. Kemajuan suatu desa dapat dilihat dari bagaimana kompetensi dan keterampilan SDM yang ada di desa, SDM yang kurang terampil dapat menghalangi kemajuan desa. Dalam kata lain kemajuan suatu wilayah sangat tergantung terhadap peran dari SDM yang berada di wilayah tersebut (Murialti et al., 2025).

Dalam pasal 78 undang-undang no 3 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa) dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan Pembangunan SDM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa seperti yang ada di dalam

pasal 67 ayat 2 poin b yang menyatakan bahwa desa berkewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Damaiyanti (2024), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dengan indikator pengambilan keputusan, kemampuan dalam memotivasi, berkomunikasi, tanggung jawab, serta pengendalian emosi dinilai baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan wisata Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. kepemimpinan kepala desa menyumbang 62,7% terhadap pengembangan wisata, sedangkan sisanya 37,3% dipengaruhi faktor lain.

Dalam penelitian Siahaan & Komariah (2022), menjelaskan bahwa kepala desa dengan gaya kepemimpinan *task oriented* (mengatur, mengarahkan, mengawasi) dan *employee oriented* (memotivasi, melibatkan bawahan dalam sebuah keputusan). Secara bersama-sama kepemimpinan kepala desa dan aparatur desa berpengaruh 34,7 %, namun secara parsial kepala desa tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, di mana sisanya sekitar 65,3 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti anggaran, partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi, serta infrastruktur. Sehingga peran kepala desa tidak secara langsung berkontribusi nyata dalam keberhasilan pembangunan Desa Sriamur Bekasi karena meskipun pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan.

Dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas, memberikan beberapa pandangan yang bisa mempengaruhi pembangunan desa. Pandangan pertama, menunjukkan bahwasanya kepemimpinan kepala desa mempunyai

pengaruh besar dalam pembangunan desa (pengembangan SDM), pandangan kedua menjelaskan bahwasanya ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan desa seperti anggaran, partisipasi, masyarakat, kondisi ekonomi, serta infrastruktur.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis mempunyai ketertarikan dengan judul ini karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari kepemimpinan Kepala Desa Sadasari terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia. Sebab kepala desa mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia terlebih pembangunan SDM merupakan amanat dari undang-undang desa. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan sumber daya manusia secara objektif dan terukur. Pendekatan kuantitatif dipilih, karena dapat dikatakan sebagai pendekatan yang efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan data objektif, sistematis, dan berbasis data (Jufri, 2022).

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian sendiri merupakan suatu permasalahan yang memungkinkan adanya investigasi secara empiris, identifikasi masalah akan menunjukkan kepada pembaca terkait mengapa peneliti memilih penelitian tersebut. Karena pada dasarnya riset membutuhkan pengetahuan, keahlian, perencanaan, waktu, serta biaya, dengan hal tersebut masalah yang dikaji harus benar-benar penting untuk diteliti (Nasution, 2021). Adapun identifikasi

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan, baik itu pengaruhnya besar ataupun kecil.
- 1.2.2. Belum tersedia data empiris serta efektivitas yang mengukur besarnya pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan SDM.
- 1.2.3. Pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan sumber daya manusia.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang membatasi masalah yang terlalu luas/lebar sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Tujuan adanya batasan masalah, agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas/lebar terhadap aspek-aspek yang jauh dari kata relevan sehingga peneliti dalam melakukan penelitian bisa fokus terhadap suatu fokus penelitian yang sedang dilakukan (Kustati, 2023). Dalam hal ini, penulis mengkonsentrasikan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan sumber daya manusia di Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu Apakah Kepemimpinan Kepala Desa Berpengaruh terhadap Pembangunan Sumber

Daya Manusia di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa Berpengaruh terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini didasarkan atas dua aspek kegunaan, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1.6.1. Aspek Teoritis

- 1.6.1.1. Menambah kajian empiris tentang kepemimpinan kepala desa dan pembangunan SDM di tingkat lokal.
- 1.6.1.2. Menjadi rujukan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji antara hubungan kepala desa dengan pembangunan sumber daya manusia pada lokasi lainnya.

1.6.2. Aspek Praktis

- 1.6.2.1. Memberikan rekomendasi secara efektif kepada kepala desa tentang bagaimana kepemimpinan yang relevan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 1.6.2.2. Bisa dijadikan bahan dalam pembinaan kepala desa oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dalam program kapasitas peningkatan kepemimpinan kepala desa.